



Harry Azhar: Rekomendasi BPK Wajib Ditindaklanjuti

NANGA PINOH, SP - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis hadir di Melawi bersama jajaran pimpinan BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (10/11) siang di Pendopo Bupati Melawi. Harry yang ikut dibawa dalam kegiatan kunjungan kerja dan reses anggota DPR RI, Sukiman memaparkan sejumlah hal terkait dengan proses pemeriksaan keuangan negara.

"Saya memeriksa 18 provinsi, artinya membawa 18 kepala perwakilan BPK di daerah, salah satunya Kalbar. Termasuk sejumlah lembaga lainnya. Nah, Penentuan daerah dapat WTP atau tidak, nanti dari perwakilan tentu akan melapor ke saya," katanya di depan Bupati Melawi, Panji serta sejumlah kepala dinas dan undangan.

Harry yang sebelumnya menjadi Ketua BPK RI menegaskan, anggaran negara diperiksa tanpa terlewatkan satu sen pun.

"Siapa pun yg menyelewengkan anggaran negara akan ditindaklanjuti aparat hukum, kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Kantor presiden kalau ada uang negara di sana tetap kita periksa," tegasnya.

Dalam proses pemeriksaan keuangan negara, BPK, lanjut Harry menargetkan tiga hal. Yang paling utama terkait soal aset. Bila bermasalah hal tersebut, bisa menyebabkan daerah gagal mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) apalagi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kedua soal Bansos. Seperti kasus gubernur Sumut, saat itu BPK temukan Rp300 miliar dana bansos yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Maka kemudian masuk ke kejaksaan dan keluar surat penyidikan. Gubernur Sumut saat itu, sempat menang di pra peradilan, tapi justru ketangkap KPK karena adanya aliran uang ke panitera pengadilan," katanya.

Target BPK yang ketiga

ujar Harry adalah soal Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Sektor ini terkadang sering ada penyimpangan. Walau dalam SPJ sudah dilengkapi tiket pesawat hingga sewa hotel, BPK, kata Harry tentu tak hanya melihat kwitansi penggunaan dana perjalanan dinas tersebut.

"Tapi kami cek langsung dan konfirmasi. Kami punya akses ke database maskapai. Kalau tak ada nama berarti sudah diduga itu tiket fiktif. Kalau fiktif berarti kesengajaan. Dan ini bisa kena hukuman penjara," tegasnya.

Harry juga menegaskan rekomendasi BPK, wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ada dua model rekomendasi, mulai yang bersifat administratif, hingga adanya rekomendasi karena adanya penyelewengan.

"Mohon perhatikan rekomendasi BPK ini. Kalau ini selesai, tahun depan Melawi bisa meraih WTP," pesannya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Sukiman mengatakan dalam setiap reses ia selalu membawa mitra mitra kerja dari komisi XI DPR RI, mulai dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Sedangkan, khusus di Melawi, Sukiman membawa BPK RI.

"Komisi XI saat ini juga membahas berbagai persoalan terkait keuangan negara. Seperti soal serapan dana desa di mana ada Rp11,7 triliun yang tidak terserap. Ini kita tanyakan ke kementerian terkait karena banyak masalah, tak hanya di desa, tapi juga di pusat," katanya.

Sukiman juga memaparkan adanya pengurangan APBN dan APBD karena sektor penerimaan negara dari PNBPN maupun pajak tidak tercapai Rp50 triliun dari target.

"Bukan hanya Melawi yang kena pengurangan, tapi juga seluruh daerah. Realitas ini terjadi secara keseluruhan baik DAU, DAK reguler, DAK penugasan dan DAK afirmasi," katanya. **(eko/jee)**